

SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.

KEBIJAKAN KEPATUHAN ANTI-KORUPSI GLOBAL

Pengantar

Samsonite International S. A. dan setiap divisi, anak perusahaan, usaha patungan dan afiliasi-afiliasinya (secara bersama "Samsonite") memiliki komitmen untuk menjalankan semua aspek usaha mereka dalam kepatuhan pada standar hukum dan etika yang tertinggi. Samsonite mengharapkan semua orang yang bertindak atas namanya untuk menjunjung tinggi komitmen ini. Guna membantu Samsonite menjunjung tinggi komitmen ini dalam konteks isu-isu yang berkaitan dengan sogokan, Samsonite merancang dan menerapkan Kebijakan Anti-Korupsi Global berikut ("Kebijakan" ini).

Kebijakan

Adalah merupakan kebijakan Samsonite bahwa semua Samsonite Associates (sebagaimana yang didefinisikan berikut ini) harus menjalankan semua kegiatan mereka dengan ketaatan penuh terhadap semua undang-undang anti-korupsi yang berlaku, termasuk tanpa terbatas Undang-Undang A.S. mengenai Praktik Korupsi Asing/Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), Undang-Undang Penyogokan Inggris/UK Bribery Act dan undang-undang anti-korupsi lainnya yang berlaku di negara-negara di mana Samsonite Associates beroperasi. Tidak melakukan hal sedemikian dapat merusak baik reputasi maupun keberhasilan bisnis Samsonite dan mengakibatkan baik Samsonite maupun individu-individu mengalami liabilitas perdata dan pidana. Untuk menghindari ketidakpatuhan perilaku etis yang konsisten harus terus menerus dijaga. **Dengan kata lain, Anda harus menghindari perilaku yang merupakan permintaan, menerima, memberi atau menawarkan sesuatu yang berharga kepada atau dari siapa pun sebagai balas jasa terhadap kinerja yang tidak pantas dalam melakukan kewajiban resmi atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak adil.** Halaman-halaman berikut ini menggambarkan persyaratan-persyaratan Samsonite dalam melakukan bisnis dengan cara yang mematuhi semua undang-undang anti-korupsi yang berlaku, termasuk FCPA dan Undang-Undang Penyogokan Inggris.

Untuk siapa Kebijakan ini berlaku?

Kebijakan ini berlaku untuk semua direktur, pejabat, pegawai, agen, perwakilan dan semua orang-orang terkait yang bertindak atas nama Samsonite (secara bersama, "Samsonite Associates").

Transaksi atau interaksi apa yang dicakup dalam Kebijakan ini?

Kebijakan ini berlaku untuk semua interaksi atau transaksi yang : a) melibatkan pegawai, agen, instrumentalitas pemerintah manapun, termasuk departemen atau instansi pemerintah manapun, partai-partai politik, para kandidat untuk jabatan, badan-badan usaha yang sepenuhnya maupun yang secara sebagian dimiliki oleh negara dan semua pegawai badan-badan usaha sedemikian (secara bersama, "Pejabat-Pejabat Pemerintah"); atau (b) memiliki koneksi dengan Kerajaan Inggris, termasuk Wilayah-Wilayah Seberang Laut, termasuk namun tidak terbatas pada Cayman Islands, British Virgin Islands, dan Bermuda ("U.K.").

Harap diperhatikan bahwa, selain persyaratan-persyaratan dalam Kebijakan ini, Pedoman Perilaku Samsonite melarang Samsonite Associates menawarkan, meminta atau menerima sogokan, potongan harga atau komisi yang tidak sah, tanpa memandang apakah perilaku sedemikian melibatkan Pejabat-

Pejabat Pemerintah atau memiliki koneksi dengan U.K.. Samsonite Associates diwajibkan untuk mematuhi persyaratan Pedoman Perilaku dan Kebijakan ini.

Kemana saya bertanya mengenai pelaksanaan Kebijakan ini?

Samsonite Associates yang memiliki pertanyaan sehubungan dengan persyaratan-persyaratan Kebijakan ini atau undang-undang yang berlaku harus berkonsultasi dengan bagian hukum Samsonite di wilayah mereka atau Penasihat Hukum Samsonite.

Apa kewajiban saya berdasarkan Kebijakan ini?

Samsonite Associates tidak boleh meminta, menerima, memberi, menawarkan untuk memberi, atau menjanjikan pembayaran atau memberi apa pun yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada atau dari pihak ketiga manapun termasuk tanpa terbatas pada Pejabat Pemerintah manapun dengan maksud untuk membantu Samsonite mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas.

Jikalau berhadapan dengan permintaan atau permohonan untuk pembayaran atau perilaku lainnya yang tidak pantas yang dapat melanggar kebijakan ini, permintaan atau tuntutan itu harus segera ditolak dan segera dilaporkan pada Penasihat Hukum Samsonite. Sebaliknya, para pegawai dapat secara anonim melaporkan pelanggaran atau kecurigaan adanya pelanggaran melalui Saluran dan Situs Web Pelaporan Etika Bisnis sebagaimana yang digambarkan dalam Pedoman Perilaku Samsonite. Adalah merupakan kebijakan yang ketat dari Samsonite bahwa tidak ada hukuman yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan diberlakukan terhadap personil manapun sebagai pembalasan untuk laporan dengan iktikad baik akan adanya pelanggaran atau kecurigaan pelanggaran terhadap undang-undang anti-korupsi atau Kebijakan ini.

Bagaimana kebijakan ini berlaku untuk hadiah, jamuan makan, hiburan atau barang-barang lain yang bernilai?

Kebijakan ini mengakui bahwa perilaku bisnis yang sopan, khususnya di negara-negara tertentu, mungkin mencakup Samsonite Associates memberi hadiah yang sederhana kepada rekannya sebagai sopan santun bisnis atau kebiasaan setempat. Demikian pula, jamuan makan atau hiburan dapat digunakan untuk memperkuat hubungan persahabatan tanpa adanya niat yang tidak pantas. Oleh karena itu, peraturan-peraturan berikut ini berlaku untuk hadiah, jamuan makan dan hiburan:

Hadiah

Hadiah yang diberikan oleh Samsonite Associates

Pedoman umum berikut mengenai hadiah berlaku untuk semua interaksi atau transaksi dengan Pejabat-Pejabat Pemerintah, dan juga dengan semua interaksi dan transaksi yang memiliki hubungan dengan U.K.:

- Tidak ada hadiah tunai atau yang setara dengan tunai yang diperbolehkan.
- Hadiah harus dalam nilai yang wajar.

- Hadiah harus diperbolehkan berdasarkan undang-undang setempat.
- Hadiah harus, sejauh pengetahuan Anda, diperbolehkan oleh pedoman atau kebijakan tempat bekerja penerima (jikalau ada).
- Hadiah harus diberikan secara terbuka dan dengan transparansi penuh.
- Hadiah harus diberikan sebagai wujud penghargaan, keramahtamahan atau untuk membalas keramahtamahan, dan harus sejalan dengan kebiasaan setempat.

Hadiah yang diterima oleh Samsonite Associates.

Semua hadiah yang melampaui AS\$250 (atau nilai yang setara dalam mata uang setempat) dari pihak manapun yang melakukan usaha atau bersaing dengan Samsonite, harus dilaporkan kepada atasan langsung, dan juga kepada bagian hukum di kawasan Anda atau kepada Penasihat Hukum Samsonite.

Jamuan Makan dan Hiburan

Larangan di atas dalam soal memberi hadiah tidak mencegah Samsonite Associates dari melakukan “hiburan bisnis yang wajar dan biasa” ketika mengundang klien, prospek atau rekan-rekan bisnis lainnya sesekali untuk makan, acara olahraga, teater, atau acara hiburan lainnya yang setara. Orang Samsonite yang mengundang untuk acara itu harus hadir dalam acara tsb. Demikian pula, larangan menerima hadiah tidak mencegah Samsonite Associates untuk menerima “hiburan bisnis yang wajar dan biasa.” Dalam semua hal, hiburan tidak boleh begitu sering atau begitu mewah dan besar-besaran sehingga menimbulkan pertanyaan akan kepantasannya.

Pedoman umum dalam menyediakan jamuan dan hiburan.

- Semua biaya hiburan bisnis harus bernilai wajar. Ini termasuk baik suatu biaya atau serangkaian biaya yang dibayarkan untuk seorang pejabat atau sebuah badan. Hiburan bisnis tidak boleh mewah atau tidak patut untuk acara itu.
- Biaya hiburan bisnis harus diperbolehkan berdasarkan undang-undang setempat.
- Biaya hiburan bisnis harus, sejauh pengetahuan Anda, diperbolehkan berdasarkan pedoman atau kebijakan tempat bekerja penerima (jikalau ada).
- Biaya hiburan bisnis harus mematuhi kebiasaan dan praktik setempat.
- Ketika mungkin, pembayaran untuk hiburan bisnis harus dilakukan secara langsung oleh Samsonite kepada penyedia jasa, dan tidak boleh melewati atau dibayarkan secara langsung kepada Pejabat Pemerintah, misalnya sebagai ganti pembayaran.
- Biaya hiburan bisnis harus menghindari kesan tidak pantas.

- Jamuan makan atau hiburan terkait bisnis yang terjadi ketika Samsonite Associates tidak hadir dan ketika Samsonite membayar untuk biaya-biaya Pejabat Pemerintah yang berkaitan dengan perjalanan akan dianggap sebagai "hadiah" dan tunduk pada peraturan dan persyaratan hadiah sebagaimana yang dijabarkan dalam Kebijakan ini.

Pedoman umum mengenai menyediakan atau menerima hiburan yang digabungkan dengan perjalanan

Tanpa membatasi bagian sebelumnya, persetujuan sebelumnya harus didapatkan dari atasan langsung ketika Samsonite Associates berniat menerima atau memberikan tawaran hiburan yang berkaitan dengan perjalanan di luar wilayah metropolitan di mana pegawai (atau penerima) bekerja dan bernilai lebih dari AS\$1.000 atau yang setara dalam mata uang setempat.

Pedoman umum dalam hiburan untuk Pejabat-Pejabat Pemerintah

Berdasarkan pedoman umum, sebelum memberikan jamuan makan, hiburan atau perjalanan dan penginapan apa pun kepada Pejabat Pemerintah, semua Samsonite Associates harus berkonsultasi dengan bagian hukum di kawasan mereka atau dengan Penasihat Hukum Samsonite.

Sampel- Sampel Produk

Pedoman umum mengenai penyediaan sampel pada Pejabat-Pejabat Pemerintah atau Pelanggan Pemerintah.

Samsonite memanufaktur dan menjual berbagai produk yang bernilai dalam latar komersial. Dari waktu ke waktu, Samsonite mungkin memproduksi sampel produk-produknya untuk dipertimbangkan atau dievaluasi oleh pelanggan prospektif atau untuk tujuan-tujuan lainnya. Ketika sampel diminta oleh, atau diberikan kepada, instansi pemerintah asing atau Pejabat Pemerintah, Samsonite Associates dan semua Pihak Ketiga (sebagaimana yang didefinisikan di bawah) yang dipekerjakan oleh Samsonite harus berhati-hati. Sampel tidak boleh diberikan secara langsung kepada Pejabat Pemerintah untuk digunakan secara pribadi. Produk Samsonite apa pun yang diberikan kepada Pejabat-Pejabat Pemerintah untuk penggunaan pribadi harus dianggap sebagai hadiah, dan pemberian hadiah sedemikian harus mematuhi ketentuan-ketentuan Kebijakan ini yang berhubungan dengan hadiah. Sampel hanya boleh diberikan kepada Pejabat-Pejabat Pemerintah di mana pedoman-pedoman berikut ini diikuti:

- pemberian sampel itu adalah dalam rangka menjalankan bisnis Samsonite secara biasa.
- pemberian sampel itu adalah keperluan yang beralasan untuk memungkinkan Pejabat Pemerintah mengevaluasi apakah membeli produk (-produk) itu dari Samsonite, atau keperluan yang beralasan untuk memungkinkan Pejabat Pemerintah melakukan kewajiban resminya (misalnya membantu petugas bea cukai atau personil penegak hukum dalam mengidentifikasi produk Samsonite yang asli vs. yang palsu).
- sampel-sampel disediakan kepada badan (bisnis terkait dengan pemerintah atau instansi pemerintahan), bukan kepada individu atau Pejabat Pemerintah untuk penggunaan secara pribadi.
- pemberian sampel harus diperbolehkan oleh undang-undang setempat yang berlaku.

- pemberian sampel harus secara akurat dan selengkapnya dicatat dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.

Magang/Pemberian Pekerjaan

Kadang-kadang, Perusahaan mungkin menemukan bahwa sanak saudara dari pelanggan atau Pejabat Pemerintah berusaha untuk magang atau bekerja di Samsonite.

Kebijakan Samsonite adalah: (1) Samsonite Associates tidak boleh menawarkan magang atau pekerjaan kepada sanak saudara pelanggan atau Pejabat Pemerintah dengan maksud mempengaruhi tindakan pelanggan atau Pejabat Pemerintah; (2) jikalau Samsonite Associates menerima permintaan dari pelanggan atau Pejabat Pemerintah untuk mempekerjakan sanak saudara pelanggan atau Pejabat Pemerintah itu, Samsonite Associates yang menerima permintaan itu harus segera menghubungi bagian hukum di kawasan mereka atau Penasihat Hukum Samsonite untuk mendapatkan nasihat; (3) jikalau dalam keadaan biasa, ditentukan bahwa kandidat yang dipertimbangkan untuk magang atau bekerja adalah sanak saudara dari pelanggan atau Pejabat Pemerintah, baik bagian hukum kawasan atau Penasihat Hukum Samsonite harus diberitahukan mengenai hubungan antara keluarga kandidat (atau badan di mana anggota keluarga bekerja atau berafiliasi) dan Samsonite; dan (4) jikalau ternyata kandidat untuk magang atau bekerja adalah sanak saudara pelanggan atau Pejabat Pemerintah dan kandidat sementara dievaluasi di luar keadaan biasa untuk mengisi lowongan, magang dan tawaran pekerjaan harus terlebih dahulu disetujui oleh bagian hukum kawasan atau Penasihat Hukum Samsonite.

Sumbangan Amal

Pihak penegak hukum yang berwenang telah menentukan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, pemberian sumbangan kepada badan amal uang berkaitan dengan, atau yang ditunjuk oleh Pejabat Pemerintah memberikan keuntungan kepada orang itu dalam kaitan dengan undang-undang anti-korupsi. Oleh karena itu, sumbangan-sumbangan yang dilakukan kepada organisasi-organisasi di mana Pejabat Pemerintah atau individu atau badan apa pun yang berkuasa untuk menentukan atau mempengaruhi kegiatan komersil perusahaan memiliki peran kunci (misalnya sebagai anggota dewan atau pengurus), atau dibuat berdasarkan permintaan individu tsb. dapat dipertanyakan berdasarkan undang-undang anti-korupsi dan Kebijakan ini. Namun demikian, sekadar adanya keterlibatan Pejabat Pemerintah tidak lalu berarti bahwa sumbangan tidak boleh diberikan. Itu berarti bahwa kepatuhan yang sepatutnya dan tinjauan hukum serta persetujuan harus terlebih dahulu diperoleh.

Sumbangan amal yang dilakukan oleh Samsonite atau pegawai-pegawainya untuk organisasi-organisasi amal yang memiliki sponsor yang besar atau yang ternama dari Pejabat Pemerintah atau individu atau badan yang berkuasa untuk menentukan atau mempengaruhi kegiatan komersil Samsonite harus terlebih dahulu disetujui oleh bagian hukum kawasan atau Penasihat Hukum Samsonite.

Sumbangan amal hanya akan disetujui untuk alasan filantropis yang sah seperti misalnya untuk kepentingan kemanusiaan dan untuk mendukung lembaga-lembaga kebudayaan atau pendidikan. Ada kemungkinan untuk memberikan sumbangan dengan harapan membangun pandangan baik masyarakat terhadap Samsonite. Namun demikian, sumbangan amal tidak pernah diperbolehkan, tanpa memandang jumlah sumbangan, jikalau tujuan sumbangan itu adalah untuk mempengaruhi keputusan.

Sumbangan Politik

Kebijakan Samsonite mengenai sumbangan politik dijabarkan dalam Pedoman Perilaku Samsonite.

Uji Tuntas (Due Diligence) bagi para Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya

Komitmen Samsonite untuk mematuhi undang-undang anti-korupsi juga mencakup kegiatan-kegiatan pada agen, konsultan, perwakilan Samsonite dan orang-orang lain yang terkait (secara bersama, "Pihak Ketiga") ketika Pihak Ketiga itu, atas nama Samsonite, berinteraksi dengan atau terlibat dalam transaksi dengan Pejabat-Pejabat Pemerintah, atau terlibat dalam interaksi atau transaksi yang memiliki koneksi dengan U.K. Samsonite Associates harus berhati-hati untuk menghindari segala macam situasi yang melibatkan Pihak Ketiga yang mungkin dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap Kebijakan ini atau undang-undang anti-korupsi yang berlaku. Karena tindakan ilegal atau tidak pantas dari para agen dapat berdampak serius dan merusak terhadap Samsonite dan para personilnya, kami mengharuskan para Pihak Ketiga kami untuk mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kebijakan ini dan semua undang-undang yang berlaku.

Karena Samsonite berurusan dengan berbagai Pihak Ketiga, Perusahaan mempergunakan pendekatan berdasarkan risiko dalam tingkat uji tuntas dan evaluasi yang diperlukan sebelum mempekerjakan Pihak Ketiga. Harap hubungi bagian hukum di kawasan Anda atau Penasihat Hukum jikalau ada pertanyaan sehubungan dengan uji tuntas terhadap Pihak Ketiga.

Uji tuntas yang terkait dengan anti-korupsi diperlukan untuk kategori-kategori berikut dalam hubungan Pihak Ketiga:

- Semua kontrak dengan penyedia layanan pihak ketiga di mana jumlah besar dari layanan yang disediakan membutuhkan interaksi dengan, atau berkaitan secara langsung dengan, instansi-instansi pemerintah atau para pejabat (e.g. pialang bea cukai, konsultan pajak (selain dari penyedia jasa internasional yang sudah ternama), para konsultan dalam hal mendapatkan subsidi pemerintah, dll.).
- Semua kontrak dengan perwakilan sales atau distributor yang mungkin membangun hubungan penjualan dengan lembaga-lembaga atau pejabat pemerintah.
- Semua mitra usaha patungan yang baru.

Uji tuntas yang terkait dengan anti-korupsi umumnya tidak diperlukan untuk kategori-kategori berikut dalam hubungan pihak ketiga:

- Kontrak-kontrak dengan penyedia jasa layanan internasional yang terkemuka (firma hukum, perusahaan akuntansi, perusahaan konsultan, bank-bank investasi, dll).
- Kontrak dengan sales atau distributor yang tidak diharapkan untuk melakukan bisnis yang besar dengan pejabat-pejabat atau badan-badan pemerintah – *i.e.* para pihak yang akan membeli dan menjual kembali, atau sekadar menjual produk-produk Samsonite.

Ketika mengevaluasi risiko korupsi, apakah "Tanda Bahaya" yang mengindikasikan potensi korupsi?

“Tanda Bahaya” adalah tindakan-tindakan atau fakta-fakta tertentu yang seharusnya mengingatkan Samsonite Associates bahwa ada kemungkinan Kebijakan ini akan dilanggar. Setiap situasi harus dievaluasi secara kasus per kasus untuk menentukan apakah ada Tanda-Tanda Bahaya. Tanda Bahaya tidak berarti sudah ada pelanggaran. Tanda Bahaya sekadar merupakan sinyal bahwa perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Semua Samsonite Associates harus waspada untuk melihat tanda-tanda ini dan mengangkat keprihatinannya kepada bagian hukum kawasan atau Penasihat Hukum Samsonite. Contoh-contoh Tanda Bahaya termasuk:

- tuduhan adanya praktik bisnis yang tidak pantas yang dilakukan oleh Samsonite Associates;
- hubungan keluarga atau hubungan lainnya antara Samsonite Associates dan Pejabat Pemerintah yang dapat secara tidak pantas mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah itu;
- Pihak Ketiga yang terkait dengan, atau direkomendasikan oleh, Pejabat Pemerintah;
- Pejabat Pemerintah atau perwakilannya menuntut retensi pihak tertentu atau menyarankan bahwa retensi sedemikian akan memudahkan untuk mendapatkan usaha;
- permintaan oleh Pejabat Pemerintah atau pelanggan untuk magang atau pekerjaan untuk teman/sanak keluarga;
- negara yang terlibat memiliki reputasi dalam soal korupsi dan penyogokan;
- Pihak Ketiga meminta dibayar dengan tunai atau di negara yang berbeda;
- faktur tidak dicatat dengan baik atau untuk jumlah atau kuantitas yang lebih besar dari yang normal;
- Pihak Ketiga terbukti atau dituduh melanggar undang-undang setempat;
- konsultan bersikeras untuk menerima pembayaran komisi sebelum pengumuman atau keputusan kontrak;
- pembayaran untuk layanan yang tidak disebutkan atau yang dipertanyakan;
- komisi, biaya atau bonus yang melampaui takaran nilai layanan (*e.g.*, “biaya keberhasilan”);
- permintaan untuk hiburan, hadiah atau bepergian secara mewah dalam kaitan dengan negosiasi;
- Pihak Ketiga menolak menaati undang-undang yang berlaku atau Kebijakan ini; atau
- pernyataan oleh Pihak-Pihak Ketiga seperti “Saya tidak memiliki pengalaman dalam bidang industri Anda, namun saya mengenal orang yang tepat.”

Apa sanksi terhadap pelanggaran Kebijakan ini?

Selain membahayakan reputasi bisnis Samsonite, pelanggaran undang-undang anti-korupsi dapat mengakibatkan baik Samsonite maupun Samsonite Associates menanggung hukuman pidana dan perdata yang besar. Selain sanksi-sanksi itu, pelanggaran terhadap Kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner dari Samsonite, termasuk teguran, skorsing atau pemberhentian. Samsonite juga dapat melaporkan pelanggaran kebijakan ini pada pihak-pihak yang berwenang mengawasi, mengatur atau menegakkan hukum.

Apa persyaratan pencatatan berdasarkan Kebijakan ini?

Pegawai Samsonite harus mengikuti standar, prinsip, undang-undang dan praktik-praktik yang berlaku untuk pelaporan akuntansi dan keuangan. Secara khusus, Samsonite Associates harus memastikan bahwa tidak ada bagian apa pun dari pembayaran yang dibuat dengan tujuan yang berbeda dari yang diuraikan secara keseluruhan dan akurat dalam pembukuan dan catatan Samsonite. Tidak ada rekening yang tidak diungkapkan atau tidak dicatat yang dibuat untuk tujuan apa pun. Masukan yang salah atau yang dibuat-buat tidak boleh dilakukan dalam pembukuan dan catatan Samsonite dengan tujuan apa pun. Samsonite Associates harus memastikan bahwa semua laporan dan catatan yang dimintakan oleh manajemen diselesaikan pada waktunya dan secara lengkap. Akhirnya, dana pribadi tidak boleh digunakan untuk mencapai apa yang dilarang oleh Kebijakan ini.

Apa dokumentasi, pengakuan, dan pelatihan yang termasuk dalam Kebijakan ini?

Samsonite akan menyediakan peringatan secara berkala kepada semua Samsonite Associates untuk mengingatkan mereka akan kewajiban mereka berdasarkan Kebijakan ini dan, jikalau berlaku, memberitahukan Samsonite Associates pemutakhiran pada Kebijakan ini. Karena Kebijakan ini merupakan bagian dari Pedoman Perilaku Samsonite, semua Samsonite Associates diwajibkan untuk menyatakan kepatuhan mereka akan Kebijakan dalam formulir pernyataan yang mereka diwajibkan untuk masukkan dalam kaitan dengan Pedoman Perilaku. Selain itu, Samsonite mungkin mewajibkan Samsonite Associates tertentu untuk menyatakan kepatuhan secara berkala akan kebijakan ini, dan dari waktu ke waktu, Samsonite Associates tertentu bisa diminta untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut mengenai persyaratan-persyaratan Kebijakan ini.

Akhirnya, persyaratan FCPA dan Undang-Undang Penyogokan Inggris digambarkan dalam Lampiran terhadap Kebijakan ini. Lampiran adalah bagian penting dari Kebijakan ini dan semua Samsonite Associates harus membaca dan memahami Lampiran. Pertanyaan dapat diajukan pada bagian hukum di kawasan Anda atau pada Penasihat Hukum Samsonite.

Lampiran

1. Persyaratan Dasar FCPA

1.1. Ketetapan

FCPA dibagi dalam dua bagian utama- Ketetapan-Ketetapan Anti-Penyogokan dan Ketetapan-Ketetapan Pencatatan.

1.1.1. Ketetapan Anti-Penyogokan

Ketetapan Anti-Penyogokan dalam FCPA membuat semua pemberian, penawaran atau janji untuk memberi sesuatu yang berharga kepada pejabat asing manapun dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas. Baik FCPA maupun Kebijakan ini mengharuskan istilah-istilah ini ditafsirkan secara luas. Sekalipun ada sejumlah skenario yang berisiko kegiatan yang tidak pantas, contoh-contoh umum termasuk skenario-skenario seperti menegosiasikan kontrak potensial dengan, atau investasi oleh, pemerintah asing atau lembaga pemerintah, atau meminta izin dari pejabat pemerintah untuk melakukan kegiatan bisnis di negara asing, termasuk pembelian atau disposisi minat kepemilikan di perusahaan asing. Ada keadaan yang terbatas di mana pembayaran dapat dilakukan kepada pejabat asing sesuai dengan FCPA. Keadaan-keadaan semacam ini termasuk "pembayaran fasilitasi", yang merupakan pembayaran yang bisa dikatakan tidak berarti jumlahnya guna memfasilitasi atau mempercepat tindakan rutin pemerintah. Sebelum menyimpulkan bahwa pembayaran diperbolehkan karena adalah merupakan pembayaran fasilitasi, harap berkonsultasi dengan bagian hukum di kawasan Anda atau dengan Penasihat Hukum Samsonite.

Selain melarang pembayaran langsung yang tidak pantas kepada pejabat asing, FCPA dan Kebijakan ini melarang pembayaran yang dibuat kepada pihak ketiga dengan pengetahuan bahwa uang atau produk akan diteruskan kepada pejabat asing untuk tujuan yang tidak pantas. Untuk tujuan Kebijakan ini, istilah "Pembayaran" termasuk hadiah, penawaran atau janji apa pun untuk memberi sesuatu yang bernilai kepada pejabat asing dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keunggulan yang tidak pantas.

Karena larangan yang ketat akan pembayaran terhadap pejabat-pejabat asing yang diberlakukan oleh FCPA, maka adalah merupakan kebijakan yang ketat dari Samsonite bahwa tidak ada Samsonite Associates yang boleh menyediakan, menawarkan atau menjanjikan untuk menyediakan apa pun yang berharga kepada pejabat asing manapun kecuali sebagaimana yang diutarakan dalam Kebijakan ini.

1.1.2. Ketetapan Pencatatan

Ketetapan pencatatan FCPA mengharuskan perusahaan menyimpan catatan keuangan yang akurat yang mencerminkan dengan detil yang cukup akan semua transaksi dan disposisi aset. Ketetapan pencatatan FCPA dirancang untuk memastikan bahwa semua pembayaran dicerminkan secara akurat dalam catatan keuangan dan semua pembayaran telah diotorisasi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, FCPA melarang penguraian yang salah atau kelalaian pencatatan transaksi apa pun dalam catatan keuangan, serta kegagalan menjaga kendali terhadap catatan keuangan yang mengakibatkan terjadinya penguraian yang salah atau kelalaian pencatatan. Mempertahankan uraian mendetil dan akurat untuk semua pembayaran dan biaya adalah penting untuk komponen Undang-Undang ini.

Sekalipun Samsonite secara teknis tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan pencatatan FCPA, Samsonite berkomitmen untuk secara sukarela mematuhi standar-standar ini.

2. Persyaratan Mendasar Undang-Undang Penyogokan Inggris.

2.1. Ketentuan

Undang-Undang Penyogokan Inggris mengkriminalisasi empat pelanggaran berbeda:

- menawarkan, menjanjikan atau memberi “keuntungan finansial atau keuntungan lainnya” kepada siapapun dengan tujuan untuk menimbulkan atau memberikan hadiah untuk kinerja yang tidak baik dari suatu fungsi atau kegiatan;
- meminta, menyetujui untuk menerima, atau menerima “keuntungan finansial atau keuntungan lainnya” dengan tujuan agar fungsi atau kegiatan yang berhubungan dilakukan secara tidak selayaknya;
- menawarkan, menjanjikan atau memberi “keuntungan keuangan atau keuntungan lainnya”, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada "pejabat publik asing" dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan dalam menjalankan bisnis;
- gagal mencegah “orang yang terkait” dari menyogok dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan bisnis untuk organisasi komersil.

Sebagaimana yang dicatat sebelumnya, perilaku yang dilarang dalam Undang-Undang Penyogokan Inggris adalah serupa dengan yang dilarang dalam FCPA namun lebih luas dari FCPA dalam tiga hal. Pertama, dan yang paling penting, Undang-Undang menerapkan liabilitas ketat untuk tindakan pidana yang berlaku untuk perusahaan manapun yang terkait dengan UK yang gagal mencegah “orang yang terkait” (siapapun yang menyediakan layanan atas nama perusahaan) memberi sogokan. Satu-satunya pembelaan terhadap liabilitas adalah jikalau perusahaan dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki “prosedur yang cukup” untuk mencegah terjadinya penyogokan. Kedua, Undang-Undang tidak mengandung pengecualian apa pun untuk “pembayaran fasilitasi,” yaitu pembayaran yang bisa dikatakan berjumlah kecil yang dilakukan untuk memfasilitasi atau mempercepat tindakan rutin pemerintah. Ketiga, Undang-Undang mengkriminalisasi penyogokan “komersial murni” yang tidak terkait dengan pejabat pemerintah atau pejabat publik manapun, berbeda dengan FCPA, yang mana berarti penyogokan terhadap *semua* orang adalah dilarang.

Disetujui oleh Dewan Direktur Samsonite International S. A. pada 19 September 2013.